

PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN NASIONALISME:

Tantangan Menuju Masyarakat Madani di Era Global

oleh:

Siti Irene Astuti D.
(Dosen FIP-UNY)

Abstract

Democratic education is an initial step to make a more democratic society materialize, because the foundation of a civil society is democratic life in social, economic, and political fields. To maintain the nation's existence and identity, it is necessary to inculcate learners with nationalism values. Plurality principles based on social reproduction need to be taught integratedly in the educational process.

Key words: democratic education, nationalisme, civil society

A. Pendahuluan

Tugas pokok bangsa sekarang adalah menanamkan dan menyuburkan kembali semangat patriotisme dan nasionalisme. Sebab pada era globalisasi, era iptek berikut segenap dampaknya sekarang ini muncul gejala yang memprihatinkan, yaitu pendangkalan terhadap patriotisme dan nasionalisme tersebut. Kini banyak anak-anak muda yang seolah-olah tidak lagi peduli terhadap tanah air dan bangsanya. Bahkan banyak anak muda kita yang tidak hafal lagu Indonesia Raya. Mereka ini barangkali saja juga tidak tahu bagaimana "abc-nya" wawasan kebangsaan. Mereka justru lebih mengenal idola mereka seperti Madonna dan Michael Jackson ketimbang tokoh-tokoh Indonesia sendiri (Amien Rais, 1999:23).

Nasionalisme kini juga dihantam dengan dinamika baru pada akhir abad ke-20, yaitu globalisme, mondialisme dan internasionalisme. Akibatnya, batas-batas antarnegara itu seolah-olah tidak ada lagi, sehingga masyarakat berpikir pada kawasan yang lebih besar, yaitu regionalisme dan globalisme. Karena itu, agar tetap teguh berdiri sebagai bangsa, maka kita harus tetap cinta pada tanah air. Kemauan bersama-sama dan hidup bersama-sama merupakan syarat mutlak bagi bangsa ini menuju bangsa yang kuat, meski dilatarbelakangi dengan berbagai majemuknya etnik, budaya, agama dan lain-lain. Karenanya generasi muda harus menanamkan dan menyuburkan kembali semangat patriotisme dan nasionalisme (Amien Rais, 1999: 24).

Nasionalisme dapat diartikan sebagai jiwa dan semangat cinta tanah air dan bangsa. Berdasarkan pengertian tersebut kita sebagai bangsa Indonesia dituntut untuk selalu memiliki semangat untuk setia dan menjaga bangsa kita dari berbagai ancaman baik, yang datang dari dalam diri masyarakat maupun

luar masyarakat yang secara sengaja maupun tidak sengaja ingin menghancurkan eksistensi bangsa kita, baik dalam segi sosial, budaya, ekonomi maupun politik.

Untuk menjaga eksistensi bangsa kita di tengah-tengah arus globalisasi diperlukan kesadaran kritis yang disertai dengan upaya-upaya strategis agar semua warga memiliki rasa untuk tetap membangun bangsa dan identitas bangsa. Melalui tulisan ini akan diulas langkah-langkah apakah yang perlu dilakukan didalam menjaga eksistensi bangsa untuk dapat mewujudkan masyarakat madani melalui pendidikan demokratis dan penanaman nasionalisme.

B. Pembahasan

1. Tantangan Global

Globalisasi yang terus berlangsung dan berpengaruh pada semua aspek kehidupan masyarakat yang tampaknya menumbuhkan gerakan tantangan maupun resistensi baik di tingkat internasional maupun tingkat lokal. Area resistensi dan tantangan terhadap globalisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut (Fakih, 2001:223-224):

1. Tantangan gerakan kultural dan agama terhadap globalisasi

Gerakan berbasis agama timbul dimana-mana dengan berbagai label nama. Sebagai contohnya di Mesir gerakan kaum miskin muslim diberi nama dengan Fundamentalisme Islam. Gerakan teologis yang bercorak pembebasan dalam Islam terjadi di Indonesia. Sementara di India kelompok Hindu Revivalis mendesak negara untuk membekot produk asing.

2. Tantangan dari *new social movement* dan *global civil society*

Gerakan sosial adalah gerakan menentang pembangunan dan globalisasi, seperti gerakan hijau, feminisme, gerakan masyarakat akar rumput. Sebagai contohnya gerakan menentang pembangunan proyek Narmada Dam di India berhasil mendesak Bank Dunia untuk mencabut dukungannya terhadap proyek tersebut. Gerakan tersebut menentang meningkatnya sentralisasi dan watak otoritarian kekuasaan Negara dan sikap ekstratif dari proses ekonomi yang dominan. *New social movement* terus tumbuh di mana-mana, dengan aksi-aksi yang bersifat lokal.

3. Tantangan gerakan lingkungan terhadap globalisasi

Meskipun tidak semua gerakan lingkungan secara langsung menentang globalisasi, berkembangnya gerakan lingkungan pemberdayaan rakyat dan gerakan kesadaran lingkungan bersumber dari Barat. Gerakan ini banyak dipengaruhi oleh pikiran Rachel Carson dalam "*Silent Spring*" yang membongkar tentang kerusakan dunia yang diakibatkan praktek ekonomi modern, seperti penggunaan kimia dalam pertanian, langkanya burung dan khususnya menentang asumsi dan praktek pertumbuhan ekonomi yang ingin menyeimbangkan perlindungan alam dalam suatu

gaya hidup. Kesadaran lingkungan memacu gerakan “ lingkungan demi lingkungan” yang juga berakibat lahirnya gerakan fasisme ekologi (*Eco-facism*)

Menghadapi berbagai tantangan global tak heran bahwa dunia sedang mengalami krisis fundamental yang berakibat pada berbagai persoalan ekonomi, ekologi dan politik secara global. Kesenjangan di berbagai aspek kehidupan menimbulkan berbagai persoalan, seperti halnya kemiskinan, pengangguran, konflik, *deviant behaviour*, pembunuhan dan lain-lainnya. Untuk mengatasi permasalahan fundamental tersebut diperlukan kesepakatan antar berbagai agama dan praktek agama untuk membentuk satu nilai bersama yang diakui oleh semua pihak dan berlaku secara universal melalui *etik global*. *Etik global* adalah sebuah konsensus fundamental minimum berkaitan dengan nilai-nilai yang mengikat, standar-standar yang tidak bias diganggu gugat, dan sikap moral fundamental.

Namun demikian, keinginan masyarakat Indonesia mewujudkan masyarakat madani merupakan cita-cita yang perlu diupayakan, karena dengan kehidupan masyarakat madani bangsa ini lebih mampu untuk eksis dan berkompentensi dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam menghadapi berbagai tantangan global.

2. Masyarakat Madani dan Nilai-nilai Demokrasi

Dengan pendekatan eklektik, Hikam merumuskan empat ciri utama dari masyarakat madani (Tilaar, 1998:159) yaitu :

1. ***Kesukarelaan***. Artinya suatu masyarakat madani bukan merupakan suatu masyarakat paksaan atau karena indoktrinasi. Keanggotaan masyarakat madani adalah keanggotaan dari pribadi yang bebas, yang secara sukarela membentuk suatu kehidupan bersama dan oleh sebab itu mempunyai komitmen bersama yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dengan sendirinya tanggung jawab pribadi sangat kuat karena diikat oleh keinginan bersama untuk mewujudkan keinginan tersebut.
2. ***Keswasembadaan***. Artinya, keanggotaan yang suka rela untuk hidup bersama tentunya tidak akan menggantungkan kehidupannya pada orang lain. Dia tidak tergantung kepada negara, juga tidak tergantung kepada lembaga-lembaga atau organisasi lain. Setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, bahkan untuk dapat membantu sesama yang lain yang berkekurangan. Keanggotaan yang penuh percaya diri tersebut adalah anggota yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendirinya dan terhadap masyarakatnya.
3. ***Kemandirian tinggi terhadap negara***. Berkaitan dengan ciri yang kedua, para anggota masyarakat madani adalah manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak tergantung kepada

perintah orang lain termasuk negara. Bagi mereka, negara adalah kesepakatan bersama sehingga tanggung jawab yang lahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan dan tanggung jawab masing-masing anggota. Inilah negara yang berkedaulatan rakyat.

4. ***Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.*** Hal ini berarti suatu masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berlandaskan hukum dan bukan negara kekuasaan.

Bambang Sudibyo (2000) menjelaskan bahwa dalam mewujudkan masyarakat madani diperlukan empat nilai yang menjiwai demokrasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Nilai pertama adalah kebebasan. Dalam kehidupan politik, wujudnya adalah kebebasan berpolitik untuk meraih kekuasaan secara legal konstitusional. Dalam wujud kehidupan sosial, wujudnya adalah kemerdekaan berpikir, berpendapat, berbicara, dan beragama dan berkeyakinan. Sedangkan dalam kehidupan ekonomi digambarkan berkembangnya system ekonomi pasar yang mengarah pada persaingan yang sehat, distorsi yang relative kecil, serta subsidi yang rendah. Dalam konteks sistem pasar, subsidi hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap kegagalan pasar dalam menciptakan keadilan sosial. Di samping itu, perlu dihilangkan hak-hak istimewa yang cenderung mengarah pada monopoli dan oligopoli.

Nilai kedua adalah pemberdayaan sipil. Masyarakat madani secara singkat digambarkan sebagai masyarakat indenpenden dan berdaya, tidak tergantung pada Negara. Dalam konteks ini negaralah yang bergantung pada warganya. Nilai ini dapat diwujudkan dengan adanya oposisi yang benar. Dalam kehidupan sosial dengan diwujudkan kelas menengah yang makmur dan independent terhadap pemerintah. Dalam kehidupan ekonomi, pajak dan subsidi menjadi persoalan penting. Pada masyarakat sipil yang berdaya ditandai dengan tingginya pajak dan rendahnya subsidi. Artinya, masyarakatlah yang memberikan subsidi melalui pajak kepada pemerintah, sehingga membuat Negara bergantung pada rakyat. Di Indonesia, substansi subsidi mengalami distorsi yang cukup fatal. Maknanya, bahkan telah keluar dari yang dimaksudkan oleh UUD 1945. Di antara kekeliruan pemahaman itu ialah penerapan subsidi pada harga barang, dan bukan diberikan pada orang per orang atau individu-individu, yang memang membutuhkannya. Yang paling banyak mengkonsumsi barang-barang yang disubsidi itu, seperti subsidi listrik dan bahan bakar minyak, adalah orang-orang kaya yang berkecukupan. Padahal UUD 1945 pasal 28 dan 34 jelas mengisyaratkan bahwa penerima subsidi adalah mereka yang kekurangan. Sangat tingginya komponen subsidi, yakni sekitar Rp. 30 trilyun (15% dari total APBN tahun anggaran 2000), menjadikan persoalan subsidi cukup serius. Bukan saja tingginya nilai subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah, melainkan juga soal waktu. Yakni subsidi telah berlangsung lebih dari 30 tahun, sejak awal masa pemerintahan Orde Baru. Di sisi lain, tax ratio kita terhitung masih rendah, sekitar 11,1% dari produk domestic bruto. Angka tax ratio tergolong rendah di wilayah Asia Tenggara, jika dibandingkan Philipina 10%, Singapura 25%, dan

Malaysia 35%. Oleh karena itu, masih dimungkinkan peningkatan pendapatan dari sector perpajakan secara bertahap. Yang harus disiapkan adalah pembenahan perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada, di samping secara serius harus ada upaya peningkatan kinerja pajak yang bersih dari segala unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Nilai ketiga bahwa demokorasi juga meniscayakan *horizontal sharing* atau berbagi secara horizontal. Di dalam kehidupan politik, wujudnya adalah trias politika, yakni pembagian kekuasaan dan wewenang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara itu, dalam kehidupan sosial, wujudnya adalah dijunjung tingginya hak-hak azasi manusia dan kesamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Di bidang ekonomi menjadi *horizontal sharing of economic resource*. Kemerdekaan dibagi secara horizontal merata kepada seluruh warga Negara. Masyarakat didominasi oleh kelas menengah untuk makmur, berpendidikan, dan berdaya. Dalam hal ini KKN juga kecil, karena KKN sangat anti *horizontal sharing*.

Nilai demokrasi keempat adalah *vertical sharing* atau berbagi secara vertikal. Dalam kehidupan politik, mewujudkannya pada otonomi daerah. Dalam bidang sosial mwujud pada masyarakat egalitarian atau masyarakat dengan *power distance* rendah. Dalam bidang ekonomi, nilai ini menjabar pada desentralisasi fiskal atau perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, kebijakan nasional mengarah pada pembangunan ekonomi pasar, meningkatkan *tax ratio*, meluruskan kebijakan subsidi, afirmasi terhadap kelompok menjual dalam konteks system ekonomi pasar, dan desentralisasi fiskal. Semuanya merupakan bagian dari komitmen untuk mengembangkan masyarakat madani.

Sementara itu, Fukuyuma penulis buku *On Social capital and the Economy*, telah mengemukakan tesis bahwa transisi menuju system demokrasi senantiasa melewati empat tahap yakni tahap ideolgi, kelembagaan, masyarakat sipil dan tahap kultural . Tahap ideologi dapat dilalui dalam waktu yang amat pendek. Tahap ini berupa keyakinan masyarakat terhadap demokrasi, sebagai suatu system yang akan dapat mengatarkan bangsa ke kehidupan yang jauh lebih baik, lahir dan bathin. Tahap kelembagaan sudah di depan mata, yakni system Trias Politika dalam proses pemantapan. Tahap ketiga, masyarakat sispil akan muncul secara perlahan-lahan dan alami, jauh lebih lambat dibandingkan dengan tahap kelembagaan. Tahap ketiga amat penting untuk menumbuhkan tahap terakhir di mana kultur demokrasi hanya akan muncul pada masyarakat yang memiliki struktur sosial yang kuat. Kultur demokrasi merupakan etika rasional tentang tata cara hidup bermasyarakat dan bernegara yang akan menentukan perilaku politik warga masyarakat. Oleh karena itu, kultur demokrasi senantiasa akan mewariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, terutama lewat pendidikan (Zamroni, 2000:175).

Melalui tahap-tahap di atas nilai-nilai kehidupan demokrasi perlu dikembangkan dalam prinsip-prinsip hidup pada semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga proses menuju masyarakat Indonesia Baru dapat terealisasi. Persoalannya, apakah secara teoritis dan praktis sistem nilai baru akan mudah diterima dalam kehidupan masyarakat? Apakah perubahan masyarakat dengan sistem baru tidak menimbulkan disintegrasi atau kekacauan, sementara nilai lama masih berlaku dalam sistem sosial masyarakatnya?

Dalam teori fungsionalisme struktural sistem sosial tidak hanya dilihat sebagai keadaan yang ditandai oleh keseimbangan (*a state of equilibrium or balance*) dan bagian-bagian dari sistem tersebut saling bergantung satu sama lain, tetapi juga sistem sosial dianggap terdiri dari individu-individu. Agar suatu sistem terintegrasi dan stabil asumsinya adalah individu-individu yang menjadi bagian dari sistem tersebut mendukung keberadaan nilai-nilai umum yang berlaku di dalamnya. Dengan kata lain teori fungsionalisme struktural berasumsi bahwa masyarakat mempunyai sistem nilai yang menyebar ke segenap anggotanya. Apabila sebagian besar anggota masyarakat tidak setuju pada nilai tersebut, maka mudah diduga masyarakat itu akan sulit dipertahankan kelanggengannya sehingga situasi menjadi kacau. Dengan demikian dalam teori ini konsensus terhadap nilai-nilai umum adalah suatu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Teori fungsionalisme struktural menekankan pada empat hal: (1) masyarakat tidak bisa hidup kecuali anggota-anggotanya membagi persamaan persepsi, sikap dan nilai, (2) setiap bagian mempunyai kontribusi pada keseluruhan, (3) masing-masing bagian terintegrasi satu sama lain dan saling memberi dukungan, dan (4) masing-masing bagian memberi kekuatan sehingga keseluruhan masyarakat menjadi stabil (Usman, 1995:14-15).

Mengacu pada pemikiran teori fungsionalisme struktural, jelas bahwa konsep menuju masyarakat madani tidak akan dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat kita jika anggota-anggota masyarakat belum saling membagi persepsi dan bersikap yang sama dalam mewujudkan masyarakat madani. Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang mengacu pada prinsip-prinsip masyarakat madani pun perlu dikembangkan, sehingga semua anggota masyarakat merasa memiliki dan mendukung prinsip-prinsip tersebut agar tercipta suatu stabilitas sosial.

Keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat merupakan fokus perhatian dalam analisis teori ini. Lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan dan agama dianalisis dalam bentuk bagaimana lembaga-lembaga itu membantu mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini berarti bahwa lembaga-lembaga itu dipandang seberapa jauh peranannya mampu memelihara stabilitas keamanan. Oleh karenanya, model analisis yang dikembangkan oleh strukturalis dalam tradisi konsensus berbeda dengan analisis yang dikembangkan oleh strukturalis konflik. Pada teori fungsionalisme struktural yang ditekankan adalah integrasi, persamaan nilai dan stabilitas sosial.

Persoalaannya yang dihadapi oleh bangsa ini adalah bagaimana agar semua anggota masyarakat memiliki persamaan nilai tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalam masyarakat madani, merupakan suatu pekerjaan besar yang harus diperjuangkan oleh bangsa ini. Untuk itu, proses pendidikan bangsa yang membawa pada proses perubahan sistem masyarakat Indonesia adalah tugas semua anggota masyarakat. Jika tidak, proses perubahan menuju ke masyarakat Indonesia Baru justru akan menimbulkan disintegrasikan bangsa dan instabilitas sosial yang disebabkan masih adanya perbedaan nilai-nilai atau perbedaan persepsi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Upaya untuk membawa bangsa ini menuju masyarakat madani merupakan sebuah proses yang terus berlangsung hingga saat ini, di lain pihak bangsa ini tidak bisa melepaskan diri dari berkembangnya pengaruh global yang terus masuk ke semua aspek kehidupan kita. Bahkan dapat dikatakan bahwa cita-cita masyarakat menuju masyarakat madani harus berhadapan dengan nilai-nilai global yang dapat mendukung maupun menghambat bangsa ini menuju masyarakat Indonesia Baru.

Lebih lanjut lagi, pendidikan bangsa harus berlangsung dan berkembang sesuai dengan perubahan. Proses pendidikan pada dasarnya terus dikembangkan dengan tetap mengacu pada hakikat kebudayaan, sehingga bangsa ini tidak akan kehilangan budaya dan identitas bangsa. sebagaimana dijelaskan oleh HAR Tilaar (1999:39-40)..

Proses pendidikan dan proses pembudayaan harus disertai pula dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan rasa nasionalisme yakni dengan membangun sikap setia terhadap bangsa dan negara, baik pada masa perang maupun damai. Dengan kesetiaan, bangsa dan negara akan mampu meraih kemajuan di segala bidang kehidupan negara sangat diperlukan karena akan melahirkan pejuang-pejuang demi kejayaan bangsa

3. Pendidikan Demokrasi dan Nasionalisme

Perubahan politik di Indonesia yang menempatkan bangsa ini dalam posisi dan konstelasi yang dilematis dan kompleks memerlukan suatu perubahan dalam perspektif pendidikan kita, karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan persoalan politik dan ekonomi. Kaitan antara kapitalisme dan demokrasi telah lama menjadi diskursus dan tak pernah usai sampai kapanpun sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber dan Joseph Schumpeter. Weber menuliskan bahwa demokrasi hanya akan kokoh dengan fondasi industrialisasi kapitalis, sementara Schumpeter menyatakan bahwa sejarah telah membuktikan bahwa demokrasi tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Zamroni 2001: 2-3).

Masyarakat demokratis merupakan proses ekonomi kapitalis, yang perpaduan diantara keduanya merupakan benih tumbuhnya masyarakat Madani. Namun demikian, Schumpeter dengan seksama

menunjukkan adanya benih konflik yang melahirkan ketegangan antara kapitalisme dan demokrasi. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa kehidupan politik menjadi ajang perjuangan memperebutkan kekuasaan yang tidak jarang melecehkan jiwa demokrasi. Oleh karena itu, perjuangan politik harus diimbangi dengan upaya penciptaan konsensus, sebab tanpa konsensus tidak akan ada demokrasi.

Pemikir politik lainnya menyakini bahwa ada keterkaitan antara kapitalisme dan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Robert Dahl bahwa banyak bukti menunjukkan lembaga modern demokratis hanya hadir dalam masyarakat yang menjamin hak milik pribadi dan ekonomi berorientasi pasar, yang merupakan penjabaran dari kapitalisme. Sebaliknya masyarakat yang tidak menjamin hak milik pribadi dan melecehkan ekonomi pasar pasti memiliki pemerintahan yang diktator otoriter (Zamroni,2001:3).

Lebih lanjut pemikir ekonomi konservatif, seperti Milton dan Rose Friedman menyakini adanya keterkaitan antara kebebasan ekonomi politik, dan yakin bahwa keduanya muncul dari satu sumber yang sama yakni kemerdekaan individu atas kekuasaan Negara. Kemerdekaan adalah satu kesatuan yang utuh. Kemerdekaan ekonomi merupakan komponen kemerdekaan politik, dan sekaligus kemerdekaan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari instrument untuk menciptakan masyarakat demokratis.

Namun demikian tidak semua hubungan antara kebebasan ekonomi dan politik berjalan secara mulus. Sebagaimana dilontarkan oleh Mancur Olsen yang menyatakan bahwa di Negara demokrasi hanya terdapat beberapa kelompok warga masyarakat yang memiliki kemampuan lebih, dan kelompok ini senantiasa berusaha memastikan keuntungan bagi kelompok mereka sendiri di atas pengorbanan masyarakat luas. Kennedy, dalam bukunya *The Rise and Decline of Nations* mengajukan tesis, bahwa perilaku individu dan bisnis dalam masyarakat yang stabil tidak dapat menghindarkan diri dari upaya mengembangkan jaringan organisasi kolusi dan lobi yang mengakibatkan ekonomi tidak efisien dan politik tidak bersih. Dengan kata lain, di negara demokrasi munculnya sekelompok orang yang memegang kekuasaan yang besar dapat mengakibatkan munculnya kekuatan subversif ekonomi.

Mengacu pada uraian di atas dapat dipahami bahwa kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang pada intinya adalah untuk membangun masyarakat perlu disertai dengan proses pendidikan masyarakat yang demokratis. Karena dengan pendidikan yang demokratis lebih mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuan akan peran warga dalam masyarakat yang demokratis.

Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru pengetahuan akan tiga hal. *Pertama*, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga

masyarakat sendiri. *Kedua*, demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain.

Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi: kebebasan, persamaan, persamaan dan keadilan serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis (Zamroni, 2001:18).

Untuk mengembangkan pendidikan demokrasi diperlukan berbagai reformasi di bidang pendidikan seperti diuraikan oleh Zamroni meliputi :

1. *Kebebasan Akademik*

Lebih mengembangkan *school based management* . Kebebasan akademik diperlukan guna mengembangkan prinsip demokrasi di sekolah yang bertumpu pada sikap saling menghormati dan memperhatikan satu sama lain; berpikir kreatif, menemukan solusi atas problem yang dihadapi bersama, dan bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan solusi.

2. *Kebhinekaan Pendidikan*

Bhineka Tunggal Ika merupakan manifestasi kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk didalamnya kehidupan pendidikan. Tujuan pendidikan “Ika”, namun proses untuk mencapai tujuan bersifat “bhineka”. Kurikulum yang memuat pokok-pokok pengajaran dapat ditentukan secara nasional, namun penjabaran dan implementasi ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan daerah, tergantung kondisi lapangan yang ada, baik menyangkut sosial, budaya maupun sarana dan prasarana pendidikan.

3. *Perombakan materi Civics*

Prinsip indoktrinasi harus diminimalkan—karena tidak mungkin dihilangkan dan diganti dengan prinsip dialog. Aktivitas yang berbau paksaan harus diubah menjadi aktivitas dengan nuansa kesadaran. Tekanan pada prestasi dan kerja individual perlu dilengkapi dengan tekanan prestasi dan kerjasama kelompok. Materi *civics* ditekankan pada 4 aspek yang meliputi aspek sejarah asal mula demokrasi dan perkembangannya; perkembangan demokrasi di Indonesia; jiwa demokrasi dalam Pancasila dan UUD 45; dan tantangan demokrasi dalam era modern.

Disamping itu, pendidikan memiliki peran yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia agar tetap memiliki rasa juang dalam menghadapi berbagai tantangan global. Peranan pendidikan dalam mengembangkan nasionalisme sangat besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Zamroni bahwa guru perlu mengembangkan aktivitas kultural untuk mewariskan nilai-nilai nasionalisme kepada peserta didik dan menginterpretasikan menurut wawasan baru. Untuk itu diperlukan para guru yang memiliki otonomi, keberanian dan dedikasi dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pada diri peserta didik perlu ditekankan pengembangan kreativitas untuk mengembangkan nilai-nilai yang diterima guna menghadapi

tantangan-tantangan baru sesuai dengan perkembangan jamannya. Untuk mengembangkan nasionalisme di kalangan peserta didik guru dituntut untuk :

- a. Memanfaatkan "*hidden curriculum*" untuk kegiatan ko-kurikuler seefektif mungkin, yakni pendidikan yang terkait erat dengan perilaku para pelaksana pendidikan dan suasana yang melingkupi.
- b. Berani mendiskusikan isu-isu kemasyarakatan yang kontroversial.
- c. Mengembangkan materi pelajaran dari realitas sekitar tidak hanya dari apa yang ada di buku.
- d. Berani mengundang praktisi ke dalam kelas.
- e. Menekankan pada anak didik "berpikir secara global, dan bertindak secara lokal".
- f. Menekankan makna efisiensi tidak semata-mata bermakna ekonomis, tetapi meliputi pula keharmonisan dengan lingkungan, solidaritas dan kebaikan untuk kesemuanya.
- g. Mampu berperan sebagai model bagi peserta didik.

Sartono Kartodirdjo (1993:16), menguraikan bahwa ideologi nasionalisme dalam proses sejarah menunjukkan berbagai variasi, namun pada hakekatnya memuat beberapa prinsip, antara lain (1) Kesatuan (*unity*), (2) Kebebasan (*liberty*), (3) Kesamaan (*equality*), (4) Kepribadian (*individuality*), (5) Prestasi (*performance*).

Melalui penanaman nilai nasionalisme diharapkan dalam diri anak didik akan tercermin perilaku yang berjiwa nasionalis dalam dirinya. Adapun ciri-ciri orang yang setia terhadap bangsa dan negara adalah sebagai berikut (Dahlan, 1999:51):

- 1) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
- 2) Cinta tanah air, bangsa dan negara
- 3) Selalu menjunjung tinggi nama bangsa Indonesia
- 4) Merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
- 5) Segala tingkah lakunya berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabat bangsa Indonesia.
- 6) Menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 7) Menyakini kebenaran Pancasila dan UUD 1945 serta patuh dan taat kepada seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 8) Memiliki disiplin diri, disiplin social, dan disiplin nasional yang tinggi.
- 9) Berani dan jujur dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.
- 10) Bekerja keras untuk kemakmuran sendiri, keluarga dan masyarakat

Sikap seperti di atas sangat penting. Jika sikap setia ini luntur atau tidak ada, maka akan terjadi hal-hal seperti sikap menentang terhadap bangsa dan negara, orang tidak menyakini kebenaran

Pancasila dan UUD 1945, tidak adanya sikap rela berkorban, tidak adanya sikap mau menghargai bangsa sendiri, tidak adanya rasa cinta kepada negara. Pada akhirnya, rasa nasionalisme akan hilang dan rasa bangga menjadi orang Indonesia tidak ada dalam diri warga. Akibatnya, masalah identitas bangsa ini menjadi “tidak jelas” apabila orang Indonesia tidak lagi mau menunjukkan eksistensi dirinya sebagai warga bangsa Indonesia.

Lebih jauh lagi, proses penanaman nasionalisme perlu juga mengembangkan prinsip-prinsip pluralisme dalam kehidupan peserta didik. Hal ini sangatlah penting karena tantangan pendidikan bangsa Indonesia tidak hanya dihadapkan dengan arus global tetapi yang lebih penting adalah persoalan-persoalan dalam diri bangsa dalam menjaga kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa kita dengan tetap menghargai adanya realitas kebhinekaan dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara .

Dalam kaitannya dengan pendidikan, hakikat kehidupan pluralitas bertumpu pada adanya “*social reproduction*” , artinya, apa yang dilaksanakan di dunia pendidikan dewasa ini akan berbuah di masa mendatang. Kalau pendidikan mengajarkan sikap sopan-santun, kelak akan muncul sopan santun, kalau pendidikan mengajarkan korupsi kelak akan muncul generasi korup, kalau pendidikan mengajarkan disiplin akan muncul perilaku disiplin, kalau pendidikan mengajarkan manipulasi kelak akan muncul generasi manipulator, dan kalau pendidikan menanamkan jiwa pluralistik kelak akan lahir masyarakat di mana masing-masing warga hidup dan berperilaku layak dalam masyarakat pluraliti (Zamroni, 2000:81).

Sebagaimana dijelaskan oleh Zamroni bahwa dalam pendidikan pluralistik dan demokratis, siswa tidak hanya belajar bagaimana harus berperilaku sebagaimana aturan atau kemauan penguasa yang ada, tetapi juga harus belajar bagaimana dapat berpikir kritis terhadap aturan atau penguasa yang ada. Hal ini penting apabila kita menghendaki hidup bermasyarakat ini sebagai suatu masyarakat yang demokratis dimana kedaulatan politik setiap warga dijamin oleh undang-undang. Oleh karenanya, dalam masyarakat pluralistik dan demokratis, pendidikan harus mampu mengembangkan *logical reasoning, critical thinking*, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang adil.

C. Penutup

Bangsa Indonesia menghadapi tantangan global yang membutuhkan langkah-langkah strategis agar keinginan untuk mewujudkan masyarakat madani dapat terealisasikan.

Pendidikan demokrasi merupakan langkah awal untuk mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis, karena dasar pembentukan masyarakat madani adalah terciptanya kehidupan yang demokratis di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Sementara itu untuk mempertahankan

eksistensi dan identitas bangsa sangat diperlukan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam diri anak didik.

Prinsip-prinsip pluralitas yang bertumpu pada “*social reproduction*” perlu diajarkan secara “*integrated*” dalam proses pendidikan kehidupan sehingga upaya untuk menanamkan kesadaran pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan dapat dimiliki oleh setiap warga Indonesia di tengah-tengah proses perubahan sosial yang begitu pesatnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik dkk. 1999. *Membangun Masyarakat Madani*. Malang: Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dahlan, Saronji dkk. 1999. *PPKn SLTP Kelas 2*. Jakarta: Erlangga.
- Fakih, Mansour. 2001. *Sesat Pikir: Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rais, Amien. 1999. *Menyembuhkan Bangsa yang Sakit*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Soelaeman, Munandar MS. 1995. *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Eresco.
- Tilaar, HAR. 1998. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan Untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf
- , 2001. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf.